

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.

Salah satu program dari pemerintahan yang dilaksanakan DISPERKIM-LH adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ini adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni, sehat dan aman. Tujuannya ialah terbangunnya rumah yang layak huni, sehat dan aman (Pamungkas et al., 2022).

Masyarakat miskin di Padang Panjang membangun rumah jauh dari kriteria layak huni, kondisi rumah bisa dilihat dari atap rumah yang berlubang dan bocor, jendela rumahnya tidak mempunyai pencahayaan dan ventilasi, dinding rumah yang keropos atau terbuat dari bambu dan bata, lantai rumah yang beralaskan tanah dan berlubang, serta tidak memiliki kamar mandi. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tantangannya tidak hanya pada pengelolaan data, namun juga pengawalan hingga sampai ke penerima bantuan.

Program BSPS bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai

kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut. Untuk itu agar program BSPS dapat disalurkan kepada orang yang tepat maka diperlukan Sistem Penunjang Keputusan dalam menentukan calon penerima program BSPS.

Sistem Penunjang keputusan (SPK) dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut. SPK didefinisikan sebagai sistem untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semiterstruktur. SPK dimaksudkan menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. SPK dapat memberikan informasi dan dapat membantu menyediakan berbagai alternatif dalam proses pengambilan keputusan (Yanto, 2021). Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pembagian bantuan BSPS adalah tidak meratanya pembagian dan pemilihan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria. Pengambilan keputusan dapat menggunakan bantuan dari aplikasi komputer. Dimana aplikasi komputer tersebut harus menggunakan metode dari sistem pendukung keputusan, salah satunya adalah metode *Weighted Sum Model* (WSM).

Metode WSM pernah digunakan untuk penelitian dan mampu memberikan solusi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan penelitian khususnya pengambilan keputusan. Pemanfaatan metode WSM dalam pengambilan keputusan dapat dibilang metode yang mudah digunakan, serta cepat dalam melakukan proses perhitungan dan membuat keputusan (Syahputra et al., 2022). Metode WSM dikenal memiliki alur algoritma sederhana, mudah dipahami, dan mudah untuk diterapkan. Selain itu, metode WSM juga dapat memberikan hasil terbaik dalam pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Hasil dari perbandingan metode

WSM bersifat objektif, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dari cara konvensional (Nasyuha et al., 2021). Dalam menyelesaikan permasalahan dengan tepat, sistem pendukung keputusan dengan metode WSM dapat dibangun berupa website.

Beberapa penelitian pernah membandingkan antara metode *weighted sum model* (WSM) dengan metode *Weighted Product* (WP). Metode WP sendiri pernah digunakan mengambil keputusan, serta sudah dilakukan pengujian fungsional dengan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Apabila dilakukan perbandingan metode Wp dan metode WSM memiliki hasil penilaian yang berbeda. Sebenarnya metode WP dan metode WSM merupakan metode pengambilan keputusan yang sederhana dan mudah di pahami. Tetapi salah satu penelitian telah membandingkan akurasi kedua metode tersebut, dan mendapatkan hasil metode WSM memiliki akurasi yang lebih baik daripada metode WP (Nasyuha et al., 2021). Untuk itu, penelitian tentang penerima BPS di DISPERKIM-LH memilih metode WSM untuk metode yang dapat membantu pemberian prioritas.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sefrika, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR ”. Penelitian tersebut menggunakan metode TOPSIS sedangkan yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode WSM, pada penelitian tersebut berfokus kepada pemilihan prioritas kecamatan yang akan mendapatkan program BSPS berdasarkan hasil uji terhadap 5 kecamatan di kabupaten Bogor, sedangkan pada penelitian ini berfokus langsung kepada warga calon penerima program BSPS.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimana merancang sebuah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) untuk membantu DISPERKIM-LH dalam penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap warga yang membutuhkan agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat ?
2. Bagaimana menerapkan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dalam menentukan calon penerima bantuan BSPS pada DISPERKIM-LH dapat dilakukan dengan tepat dan akurat ?
3. Bagaimana perancangan desain aplikasi proses pengolahan data keputusan menentukan calon penerima BSPS pada DISPERKIM-LH dapat dilakukan dengan tepat dan akurat ?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat merancang sebuah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang dapat mengatasi masalah semi terstruktur untuk membantu DISPERKIM-LH dalam menentukan calon penerima BSPS dengan tepat dan akurat.
2. Diharapkan dengan menerapkan metode *weighted sum model* (WSM) dapat menjumlahkan pembobotan kriteria penilaian dalam menentukan calon penerima BSPS pada DISPERKIM-LH dengan tepat dan akurat.
3. Merancang desain aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MYSQL yang dapat mengolah data keputusan untuk menentukan

calon penerima BSPS pada DISPERKIM-LH dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari maksud penelitian, maka diterapkan batasan-batasan terhadap sistem yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian antara lain :

1. Tempat penelitian berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
2. Sistem Pendukung Keputusan ini memberikan informasi menentukan penerima BSPS menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM).
3. Sistem ini berfokus pada menentukan penerima BSPS.
4. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah PHP dan Database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem penunjang keputusan calon penerima program BPS pada DISPERKIM-LH agar dapat dilakukan dengan mudah.
2. Menggunakan metode WSM dalam pengambilan keputusan calon penerima program BPS pada DISPERKIM-LH agar dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.
3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL dalam proses

pengolahan dan penyimpanan data keputusan calon penerima program BSPS pada DISPERKIM-LH agar dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

1.6 Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Secara umum menentukan penerima program BSPS pada DISPERKIM-LH dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.

1. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan, melatih dalam berpikir sistematis dan ilmiah, serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan system selanjutnya.
2. Membantu pihak DISPERKIM-LH dalam menetapkan siapa saja penerima yang layak mendapatkan program BSPS sesuai kriteria yang ditentukan.
3. Dengan adanya sistem ini, DISPERKIM-LH tidak akan salah dalam menetapkan siapa calon penerima program BSPS.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

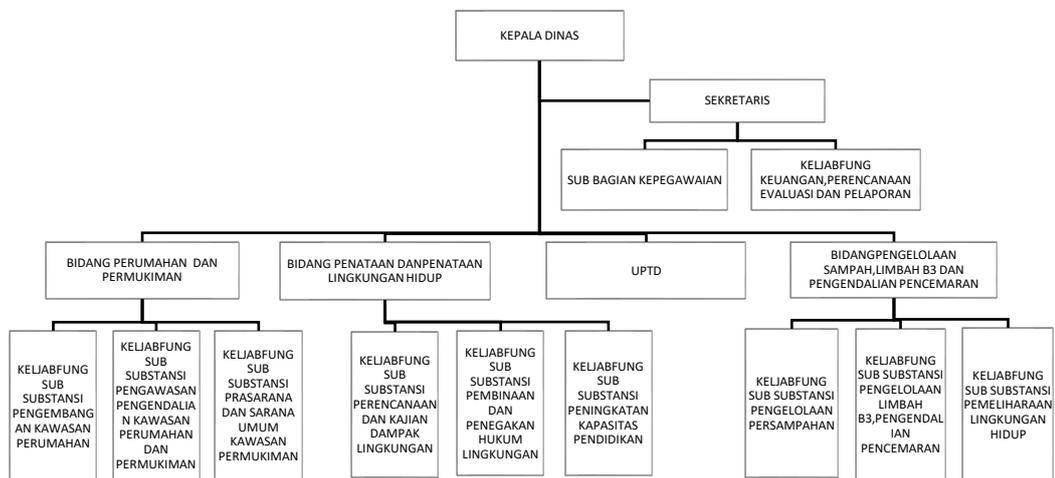
Gambaran umum kantor bertujuan memberi gambaran mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tersebut, diantaranya sejarah, struktur, tugas dan wewenang pada kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

1.7.1 Sejarah Objek Penelitian

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

(DISPERKIM-LH) Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.

1.7.2 Struktur Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Gambar 1.1 Struktur Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

(Sumber : Kantor DISPERKIM-LH, 2022)

Berikut ini adalah deskripsi struktur organisasi di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

perumahan masyarakat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta kehutanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, Kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.

4. Substansi Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Substansi Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan, perencanaan evaluasi dan pelaporan meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

5. Bidang Perumahan dan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman.

6. Substansi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya
Substansi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman.

7. Substansi Pengawasan, Pengendalian kawasan Perumahan dan Permukiman
Substansi Pengawasan, Pengendalian kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kawasan perumahan dan permukiman.

8. Substansi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman
Substansi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, serta pemantauan dan evaluasi di kawasan perumahan dan permukiman.

9. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta urusan lingkungan hidup.

10. Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan, perencanaan, melaksanakan rencana kerja, dan kajian dampak lingkungan hidup.

11. Substansi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Substansi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan, pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

12. Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta urusan kehutanan.

13. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, penyiapan, pelaksanaan, fasilitas, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pengelolaan sampah, dan limbah B3.

14. Substansi Pengelolaan Sampah

Substansi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan, perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan sampah.

15. Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3), Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Subsatansi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan, koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terhadap limbah B3 dan kerusakan lingkungan.

16. Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, penanggulangan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.

17. UPTD

UPTD(Unit Pelaksana Teknik Dinas) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembentukan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi UPTD lingkungan hidup diatur dengan peraturan Walikota tersendiri.

